

Warga Berharap Enam Hal kepada Khofifah-Emil

Mengurangi angka kemiskinan, infrastruktur, lapangan kerja, pendidikan, pertanian, perikanan, dan kesehatan jadi prioritas.

ASTRI NOVARIA
astri@mediaindonesia.com

CALON Gubernur Jawa Timur nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa mengklaim, dari hasil survei yang dilakukan oleh timnya, masyarakat Jatim mengharapkan enam hal.

Khofifah yang ditemui seacara dialog kebangsaan bertajuk Menakar Aspirasi Umat Pemilihan Gubernur Jatim 2018 di Universitas Muhammadiyah Surabaya kemarin mengatakan hal pertama yang diinginkan masyarakat ialah pengentasan warga dari kemiskinan dan yang kedua ingin pembangunan infrastruktur.

"Bayangan saya ketika turun ke lapangan, tidak langsung bikin jembatan, tapi saya melihat untuk infrastruktur pasar tradisional, kemudian di area nelayan seperti tempat pelelangan ikan (TPI) ataukah jembatan dermaga," tuturnya.

Dia menyebut, di daerah Jatim sangat banyak daerah yang ada dermaga, tetapi tidak ada TPI, ada TPI tidak ada dermaga atau tempatnya potensial, tetapi tidak ada dermaga dan TPI-nya.

"Seperti di Pamekasan atau di Sumenep juga tidak ada dermaga dan TPI. Kebayang, kalau mereka mengangkut ikan sampai 1 kilogram. Sampai di darat saat ditanya dijual di mana, mereka jawab dijual di mana-mana karena tidak ada dermaga dan juga TPI. Padahal, ini sudah puluhan tahun hidup di pesisir dan sebagai nelayan," ujarnya.

Dia menjelaskan, infrastruktur yang menjadi fokusnya ke depan ialah infrastruktur yang bisa berdampak langsung pada percepatan ekonomi dan keberdayaan masyarakat.

"Apakah itu yang di pasar tradisional atau pasar basah atau nelayan di pesisir, baik TPI maupun dermaga."

Selain kedua hal itu, nomor tiga ialah pembukaan lapangan kerja. Keempat kaitan dengan pendidikan dan kelima pertanian dan perikanan dan yang keenam kesehatan.

Suara Marhaenis

PDI Perjuangan meyakini kehadiran Puti Soekarno sebagai pasangan calon wakil gubernur dari Saifullah Yusuf (Gus Ipul) akan membangkitkan suara pemilih Marhaenis di Jawa Timur.

"Mbak Puti itu akan membangkitkan kelompok Marhaenis yang tadinya duduk akan bangun, yang bangun akan jalan, dan yang jalan akan lari," kata Ketua DPP PDIP Bambang Dwi Hartono saat menjadi penanggap dalam rilis survei Charta Politika Indonesia tentang elektabilitas cagub dan cawagub Jawa Timur di Jakarta, kemarin.

Sejauh ini Puti baru turun di Jawa Timur dalam satu bulan terakhir sehingga kontribusinya belum terlalu tampak, khususnya di wilayah Mataraman Timur.

Namun, seiring waktu Puti diyakini akan meningkatkan efek elektoral di Pilgub Jatim.

Survei Charta Politika Indonesia merekam elektabilitas Saifullah Yusuf-Puti Soekarno dan Khofifah Indar Parawansa-Emil Elistianto Dardak.

Survei dilakukan pada 3-8 Maret 2018 melalui tatap muka langsung dengan kuesioner terstruktur terhadap 1.200 responden yang tersebar di 38 kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur.

Survei menggunakan metode acak bertingkat dengan margin of error 2,8% pada tingkat kepercayaan 95%. Survei itu merekam berdasarkan pertanyaan simulasi kertas suara jika pilkada dilakukan hari ini, pasangan Khofifah-Emil meraih 38,1%, Gus Ipul-Puti 44,8%, dan undecided voters 17,1%. (Ant/P-1)



OASE BANGSA: (Dari kiri) Perwakilan tim sukses Saifullah Yusuf, Muzakki, calon Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa, Wakil Syuriah PWNUI Jatim KH Prof Ali Maschan Moesa, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah KH Dr Saad Ibrahim, Sekretaris MUI Jatim Ustaz Ainul Yaqin saat acara Obrolan Aktual Seputar Kebangsaan (Oase Bangsa) bertajuk Menakar Aspirasi Umat, Pemilihan Gubernur Jawa Timur 2018 di Gedung At-Tauhid Tower Universitas Muhammadiyah Surabaya, kemarin.

NasDem Yakin Priangan Timur Menang

PARTAI NasDem akan menggerakkan struktur mesin partai untuk memenangkan pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum di wilayah Priangan Timur, Jawa Barat. Strategi itu akan dilakukan di wilayah Priangan Timur sampai tingkat tempat pemungutan suara (TPS).

Anggota DPRD Fraksi NasDem Kota Tasikmalaya Tjahja Wandawa mengatakan sosialisasi terus dilakukan di setiap daerah, terutama di wilayah Kota/Kabupaten Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Pangandaran dan Garut, termasuk memenangkan pasangan calon Gubernur Jabar, bupati, wali kota mulai Ciamis, Garut, hingga Kota Banjar.

"Partai NasDem terus berupaya agar pasangan calon Gubernur Jabar bisa menang di wilayah Priangan Timur dengan target suara masing-masing 60% dengan menggerakkan struktur mesin partai pengusung mulai NasDem, PKB, PPP, hingga Hanura. Mereka juga

akan melakukan sosialisasi di tingkat TPS hingga sampai merangkul pemilih pemula yang menjadi sasaran utama untuk kemenangan calon," ujarnya.

Komunikasi antarpolitik pengusung pasangan calon Gubernur Jabar dan pemilihan kepala daerah yang saat ini telah dilakukan di tiga daerah untuk menang dengan target suara 65%. Namun, Partai NasDem dan partai pengusung Rindu (Ridwan Kamil-Uu) telah memiliki cara lain dan strategi untuk memenangkan calonnya pada pemilihan nanti dengan target suara 60%.

Ketua DPD Partai NasDem Kota Tasikmalaya Abdul Haris mengatakan komunikasi dan sosialisasi masih terus dilakukan dengan strategi untuk memenangkan pasangan NasDem. Pasangan calon Gubernur Jabar di wilayah Priangan Timur ini diprediksi bisa mencapai target 60%-65%.

Sementara itu, calon Gubernur Jawa Barat yang diusung PDIP TB Hasanudin

melakukan serangkaian kampanye di Kabupaten Subang, di antaranya menemui kelompok tani, gapoktan, ibu-ibu majelis taklim di Desa Tambak Dahan Subang.

TB Hasanudin di hadapan masa pendukungnya menyampaikan janji politiknya. Ia menyebut rakyat Jawa Barat harus mendapat lapangan kerja, rakyat Jawa Barat tidak boleh ada yang kelaparan. Jika terpilih, Hasanudin berjanji akan memperhatikan warganya tanpa pandang bulu.

TB Hasanudin juga berjanji akan memberikan subsidi Rp20 juta per rumah untuk program rutilahu dan warga yang belum memiliki rumah. Ia juga memiliki perhatian khusus bagi guru honorer yang menurutnya kondisi guru honorer sangat memprihatinkan dan tidak pernah diangkat menjadi PNS. Padahal, ada guru honorer sejak tahun 1974 hingga saat ini masih status honorer. (AD/RZ/P-1)

Berantas Politik Uang Diawali dari Negara

POLITIK uang yang mewarnai pesta demokrasi tidak lepas dari penggunaan uang yang seolah menjadi hal wajar demi meloloskan misi politik seorang calon kepala daerah atau parpol. Banyak pihak yang menganggapnya sebagai hal yang biasa, tetapi bagi sebagian pihak politik uang justru memprihatinkan dan harus dihilangkan.

Menurut politikus Sri Bintang Pamungkas, pemerintahlah seharusnya memberikan penyadaran kepada masyarakat agar tidak terlibat dalam politik uang. Penyadaran itu harus diiringi dengan tindakan para elite politik yang bersih dari politik uang sehingga sikap itu bisa dijadikan contoh yang baik bagi masyarakat luas.

"Negara dan elite politik yang mau berpesta ria inilah yang harus sadar terlebih dahulu," ungkap Sri Bintang.

Ia menilai praktik politik uang yang justru memperlebar pintu masuk melancarkan korupsi itu akan menjerumuskan

elite politik untuk berpolitik secara kotor. Imbasnya banyak kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, yang terlibat kasus korupsi dan kariernya terpaksa berakhir di tahanan.

Kejenuhan masyarakat terhadap para politikus kotor inilah yang juga memengaruhi tingkat antusiasme masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan baik (golput). Tak heran jika persentase suara golput dari sejumlah pelaksanaan pemilu terus meningkat bahkan terakhir mencapai 30%.

"Kalau ada partai golput, ya merekalah yang menang, itu saja. Artinya golput bukan penyebab, justru yang perlu dipertanyakan kenapa orang tidak mau berpartisipasi, karena apa," ujar Sri Bintang.

Terkait dengan politik uang, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan lebih mengapresiasi semua pihak yang menginginkan pemilihan kepala daerah bersih yang bertumpu pada adu gagasan

dan program bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat.

"Pemilihan kepala daerah harus menjadi pesta demokrasi yang bermartabat, bebas dari kampanye SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan), ujaran kebencian, kabar bohong, korupsi, dan politik uang," kata Tjahjo.

Direktur Politik Dalam Negeri pada Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar mengakui pemilihan kepala daerah secara langsung memiliki sejumlah kekurangan, antara lain para calon kepala daerah rawan disusupi kepentingan modal.

Bahtiar menilai sejumlah kekurangan lain dari penyelenggaraan pilkada langsung adalah pemilih akan menjadi individualis dan materialistis, calon kepala daerah hanya mengandalkan ketokohan dan menafikan kemampuan memimpin organisasi yang kelak dibutuhkan saat terpilih menjadi kepala daerah. (Nov/Ant/P-1)

Tahapan Pilkada Serentak 2018

Kampanye

15 Februari-23 Juni 2018

Kampanye dan debat publik

24 Juni-26 Juni 2018

Masa tenang dan pembersihan alat peraga



Pemungutan dan Penghitungan

27 Juni 2018

Pemungutan dan penghitungan suara di TPS

28 Juni-9 Juli 2018

Rekapitulasi hasil penghitungan suara

Sengketa Hasil Pemilihan

Sengketa perselisihan hasil pemilihan:

Mengikuti jadwal di Mahkamah Konstitusi

Penetapan pasangan calon terpilih pascaputusan MK:

Paling lama 3 hari setelah penetapan, putusan MK dibacakan.



Sumber: KPU



PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT. ASTRA OTOPARTS Tbk ("Perseroan")

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan, untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : **Jumat, 13 April 2018**
Waktu : **15.00 WIB s/d selesai**
Tempat : **Ballroom C, Hotel Shangri-La Jalan Jendral Sudirman Kav 1, Jakarta Pusat, Jakarta 10220**

- Dengan agenda Rapat sebagai berikut:
1. Persetujuan Laporan Tahunan, termasuk pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2017;
 2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2017;
 3. a. Perubahan susunan anggota Direksi Perseroan;
b. Penetapan gaji dan/atau tunjangan anggota Direksi serta honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan;
 4. Penunjukan Akuntan Publik untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2018.

- Dengan Penjelasan Agenda Rapat sebagai berikut:
- a. Untuk Agenda Rapat ke-1, 2, 3.b dan 4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - b. Untuk Agenda 3.a yaitu Perubahan anggota Direksi Perseroan dilakukan karena adanya usulan dari Pemegang Saham Pengendali.

- Catatan:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham, karena iklan Panggilan ini sudah merupakan undangan resmi.
 2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotocopy KTP atau tanda pengenal lain yang sah kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar membawa fotocopy dari anggaran dasarnya yang terakhir serta akta pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau pengurus terakhir. Khusus untuk Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Dalam hal Pemegang Saham tidak dapat memperlihatkan KTUR, maka Pemegang Saham tetap dapat menghadiri Rapat sepanjang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham dan membawa identitas diri yang dapat diverifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
 3. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang nama-namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham tanggal 21 Maret 2018 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 4. a) Pemegang Saham yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan menyerahkan Surat Kuasa yang sah yang bentuknya ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam Rapat namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari selama jam kerja di Kantor Perseroan Bagian Hukum, Jl. Raya Pegangsaan Dua Km 2,2, Kelapa Gading, Jakarta Utara atau dapat di unduh pada laman (website) Perseroan www.astra-otoparts.com.
 5. Bahan-bahan terkait agenda Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di laman (website) Perseroan dan di kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan penyelenggaraan Rapat.
 6. Untuk memudahkan pengaturan dan tertibnya Rapat, para pemegang saham atau kuasanya diminta dengan hormat sudah berada di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 22 Maret 2018
Direksi Perseroan

SIMULASI PEMUNGUTAN SUARA:

Petugas KPUD membantu penyandang disabilitas netra mengenali surat suara braille saat sosialisasi dan simulasi pemungutan suara Pilkada serentak 2018 di Panti Pelayanan Sosial Disabilitas Netra (PPSDN) Penganthi di Temanggung, Jawa Tengah, kemarin.



ANTARA/ANIS ERIZUDIN